



Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan (Studi Kasus Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur)

Tri Purwanti

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Bengkulu

Email: tripurwanti141@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [20 Mei 2024]

Revised [20 Juni 2024]

Accepted [23 Juni 2024]

KEYWORDS

Empowerment, Cooperatives, Evaluation.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis, ketepatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di desa sekunyit kecamatan kaur selatan kabupaten kaur dan, Untuk menganalisis faktor penghambat program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di desa sekunyit kecamatan kaur selatan kabupaten kaur. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah ketua koperasi mina maritim, sekretaris koperasi mina maritim, dan bendahara koperasi mina maritim. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah, Hasil penelitian mengenai Evaluasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir guna meningkatkan kesejahteraan nelayan, Ketercapaian Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) di Desa Sekunyit, Ketepatan Pencapaian Tujuan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) di Desa Sekunyit, dan Faktor penghambat dalam Pencapaian Tujuan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) di Desa Sekunyit. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi nelayan, sekolah, dan peneliti lain.

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze (1) the accuracy of the coastal community economic empowerment program in Sekunyit village, south Kaur district, Kaur district and (2) to analyze the inhibiting factors of the coastal community economic empowerment program in Sekunyit village, south Kaur district, Kaur district. This research is a qualitative case study research. The data sources in this study were the chairman of the maritime mina cooperative, the secretary of the maritime mina cooperative, and the treasurer of the maritime mina cooperative. The data collection method used in this research is the method of interview, observation, and documentation. Data processing is carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study are (1) the results of research regarding the evaluation of the economic empowerment program of coastal communities in order to improve the welfare of fishermen, (2) the achievement of the coastal community economic empowerment program (PEMP) in Sekunyit Village, (3) the accuracy of the achievement of the objectives of the coastal community economic empowerment program (PEMP).) in Sekunyit Village, and (4) Inhibiting factors in Achieving the Objectives of the Economic Empowerment Program for Coastal Community (PEMP) in Sekunyit Village. The results of this study are useful for fishermen, schools, and other researchers..

PENDAHULUAN

Undang-Undang No.1 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.27 tentang pengelolaan wilayah pesisir pasal 63 yang berbunyi “pemerintahan dan pemerintah daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraannya pemerintah dan pemerintahan daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi produktif lainnya”.

Sumaryadi(2005:11) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Menurut (Widjaja, 2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Adapun pendapat lain dari (Abu Huraerah, 2008:87) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut community self-reliance atau kemandirian.

Nelayan adalah penduduk yang tinggal di pesisir pantai dan sumber kehidupan ekonominya bergantung secara langsung pada kegiatan mengolah sumber daya laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa pantai atau pesisir (Sastrawidjaya, 2002). Yang penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan salah satu wilayah pesisir didesa sekunyit kecamatan kaur selatan kabupaten kaur. Kaur adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Bengkulu, Indonesia. Yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 pada tahun 2003 bersamaan dengan pembentukan kabupaten Seluma dan Mukomuko. Kaur sebelumnya merupakan bagian dari kabupaten Bengkulu Selatan

Masyarakat pesisir seperti di desa sekunyit kecamatan kaur selatan kabupaten kaur cenderung miskin. Kemiskinan ini disebabkan oleh keterbatasan akses permodalan dan kultur kewirausahaan yang tidak kondusif sehingga masyarakatnya menggunakan jasa dalam memenuhi kebutuhan modal para tengkulak, toke, atau ponggawa, yang kenyataannya tidak banyak menolong untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, malah cenderung menjeratnya dalam lilitan utang yang tidak pernah bisa dilunasi. Maka dalam hal ini, Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan di desa sekunyit kecamatan kaur selatan kabupaten kaur dibutuhkan pemberdayaan (empowering).

Pemerintah kabupaten kaur memandang dengan potensi wilayah pesisir yang besar baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia perlu adanya upaya dalam bentuk program yang berkelanjutan dan menyentuh langsung kesasarannya. Salah satu program yang bertujuan dan mendukung kearah tersebut adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Tujuan dari program ini adalah penguatan ekonomi dengan modal usaha ekonomi produktif yang berasal dari masyarakat yang berbentuk social capital (modal sosial) seperti pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan, permukiman dan infrastruktur.

Di desa sekunyit kecamatan kaur selatan kabupaten kaur, program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) sudah berjalan sejak tahun 2018, dengan adanya program PEMP ini terbukti belum membuahkan hasil yang menggembirakan karena kelompok nelayan merasa belum terbantu dan hasil tangkapannya tidak bagus dan mengalami penurunan. Keberhasilan perogram nasional bantuan kapal dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Masyarakat sekunyit yang mendapatkan program PEMP belum memenuhi biaya hidup yang cukup memadai. Hal ini yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk melakukan penelitian di desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.

LANDASAN TEORI

Evaluasi

Dari segi bahasa evaluasi berasal dari kata bahasa inggris "evaluation" yang diserap dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi "evaluasi" yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertentu.

Pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English evaluasi adalah to find out, decide the amount or value yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata -kata yang terkandung dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggung jawabkan .

Ralph Tyler (1949), yang dikenal sebagai yang pertama kali mengembangkan teori evaluasi modern mengungkapkan bahwa Evaluation is the process of determining to what extent the educational objectives are actually being realized, ia mengungkapkan bahwa evaluasi adalah sebuah proses untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan bisa terealisasi.

Pendapat Peter H Rossi dan Howard E Freeman (1985) mengungkapkan bahwa evaluation research is a systematic application of social research procedures in assessing the conceptualization and design, implementation, and unity of social intervention programs, mereka menjelaskan bahwa penelitian evaluasi adalah sebuah aplikasi prosedur penelitian sosial yang sistematis dalam menilai konseptualisasi dan perancangan, implementasi, dan kesatuan program intervensi sosial.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Sumaryadi, 2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah "upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan".

Menurut (Widjaja, 2003: 169) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan Jati diri



Harkat dan martabat nya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

(Abu Huraerah, 2008:87) Menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini adalah penelitian jenis case Study (Studi Kasus). Menurut Sugiono (2005) yang mengartikan bahwa penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Secara sederhana, dapat pula diartikan sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi si objek penelitian.

Menurut david Williams (1995) penelitian kualitatif adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang didasarkan pada latar alamiah. Tentu saja, karena dilakukan secara alamiah atau natural, hasil penelitiannya pun juga ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian kualitatif menurut Koentjaraningrat (1993: 89) mengartikan bahwa penelitian kualitatif adalah desain penelitian yang memiliki tiga format. Ketiga format tersebut meliputi penelitian deskriptif, verifikasi dan format Grounded research.

Dari beberapa pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengumpulkan data berdasarkan latar alamiah serta dapat digunakan untuk menyelidiki, menemukan, dan menggambarkan objek penelitian dalam memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Sumber Daya Ikan

Hasil penelitian Direktorat Jendral Perikanan dan Balai Penelitian Perikanan laut 2015, menyatakan bahwa perairan laut Kotatawatingin Barat Kecamatan Kumai untuk kawasan perairan Laut tanjung penghujan yang di tempati dari beberapa desa sekitaran pesisir pantai termasuk Desa Teluk Bogam diperkirakan mempunyai potensi lestari sumberdaya ikan laut (Standing Stock) teritorial sebesar 46.145 ton pertahun dengan berbagai jenis ikan pelagis besar dan kecil, demersal dan biota laut lainnya. Jenis ikan untuk Komoditi ekspor adalah tuna, cakalang, bawal, kerapu, kakap, udang putih, udang windu, lobster dan teripang serta jenis ikan untuk komoditi lainnya adalah tongkol, tenggiri, cucut, gurita, udang dogo, layur, cumi-cumi dan lain-lain.

Unit Penangkapan Ikan

a. Kapal Penangkapan Ikan

Sebagian besar armada penangkapan ikan wilayah perairan pantai desa Teluk Bogam berukuran \pm KM 5-10 GT termasuk armada penangkapan skala kecil dengan demikian, jangkauan penangkapan ikan (Fishing Ground) nelayan hanya terkonsentrasi disekitar perairan pantai (\pm 12 Mil laut).

Kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan sebagian besar masih menggunakan teknologi yang sederhana, di mana sebagian besar nelayan menggunakan perahu tanpa motor dan perahu motor tempel serta sebagian kecil menggunakan kapal motor.

b. Alat Tangkap Ikan

Alat tangkap yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan pada umumnya masih tergolong tradisional, hal ini terlihat dari teknologi alat tangkap yang masih sederhana belum menggunakan alat bantu mekanis, berdasarkan jenis alat tangkap yang berkembang diketahui bahwa perkembangan penangkapan ikan masih merupakan usaha penangkapan berskala kecil yang berarti kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan masih terbatas pada perairan pantai. Adapun jenis alat tangkap adalah Trammel Net, Gill Net, Pancing Tetap, Pancing Tonda, Pancing Lainnya, Pukat Tepi, Pukat Dogol, Pukat Payang, Pukat Cincin dan Pukat Lainnya.⁸³

Potensi Desa

Desa sekunyit merupakan desa yang kaya akan sumber daya alamnya akan tetapi masih banyak dari masyarakat disana yang kurang mampu. Dengan adanya sumber daya alam itu hendaknya di manfaatkan dengan benar oleh masyarakat sekunyit akan tetapi karena kurangnya pemberdayaan dari

pemerintah membuat masyarakat sekunyit kurang mampu dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

Pantai sekunyit terletak 4 km di sebelah utara kota Bintuhan. Pantai ini merupakan pantai karang dengan bibir pantai yang landai mulai dari desa Sekunyit–Pengubaian – Pasar lama.

Sehingga potensi ini bisa untuk di kembangkan seperti objek wisata pantai panjang di Bengkulu. Disamping pantai karang dengan pasir putih yang indah, sepanjang bibir pantai di tumbuhi oleh tanaman kelapa yang merupakan tanaman perkebunan rakyat yang menambah keindahan suasana pantai. Pantai ini merupakan salah satu yang terdekat dari kota Bintuhan, sehingga menjadi tempat wisatawan yang berkunjung ke kota Bintuhan.

Sumber daya perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Kaur, umumnya adalah nelayan tradisional yang memperoleh kemampuan melaut secara turun temurun. Sebagai akibatnya pengetahuan tentang teknologi penangkapan, pengolahan dan pemasaran umumnya masih sangat sederhana. Kegiatan perekonomian nelayan lebih ditujukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari dan sebagian besar diantaranya belum memiliki orientasi untuk mencari celah bagi peningkatan produktivitas hasil perikanan tangkap.

Tabel 1. Data penduduk desa sekunyit

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	556
2	Wanita	514

Tabel 2. Mata pencaharian penduduk desa sekunyit

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian	156 orang
2	Peternakan	5 orang
3	Perindustrian	16 orang
4	Perusahaan Jasa	27 orang
5	Nelayan	537 orang
6	Pns	72 orang
7	Pedagang	31 orang
8	Tidak Bekerja	4 orang

Tabel 3. Tingkat pendidikan penduduk desa sekunyit

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Tidak pernah sekolah	15 orang
2	Tidak tamat sd	16 orang
3	Tamat sd	120 orang
4	Tamat SLTP/Sederajat	36 orang
5	Tamat SLTA/Sederajat	361 orang
6	Tamat perguruan tinggi	114 orang
7	Belum sekolah	136 orang
8	Sedang sekolah	272 orang

Tabel 4. Perbatasan desa sekunyit

No	Perbatasan	Tempat
1	Sebelah Utara	Desa Sinar Pagi
2	Sebelah Selatan	Desa Pangubayan
3	Sebelah Barat	Lautan
4	Sebelah Timur	Desa Selasih

Hasil Penelitian

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan upaya untuk menjawab permasalahan diatas. Melalui program PEMP masyarakat pesisir dengan wadah kelompok mempunyai kebebasan untuk memilih, merencanakan dan menetapkan kegiatan ekonomi yang dibutuhkan berdasarkan musyawarah. Dengan demikian masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengawasan dan berkelanjutan.



Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 18 Tahun 2004 tentang pedoman umum pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), oleh pemerintah dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

Permasalahan yang muncul berkaitan dengan kondisi potensi sumber daya, penguasaan teknologi serta kemampuan berusaha termasuk di dalamnya dukungan moral dalam rangka meningkatkan kondisi sosial dan pendapatan masyarakat di kawasan pesisir, merupakan permasalahan umum yang sering dihadapi oleh masyarakat pesisir.

Melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) ini diharapkan dapat dibangun suatu kerangka pendekatan yang komprehensif, holistik dan harmonis dengan memperhatikan sistem nilai, kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat, potensi lokal, unit usaha masyarakat dan daya dukung lingkungan. Dengan langkah ini diharapkan tidak saja akan meningkatkan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan, pengawasan dan pengelolaan sumber daya dan pesisir, tetapi juga akan lebih menjamin kesinambungan peningkatan kesejahteraan dan sumber daya pesisir dan laut.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan salah satu program unggulan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Program PEMP mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 1999 dalam bentuk pilot project di tiga lokasi, yaitu Cilacap, Banggai dan Batam. Pada tahun anggaran 2000, pelaksanaan program PEMP dilanjutkan di 26 kabupaten/kota yang tersebar di 30 Provinsi. Semenjak tahun anggaran 2018 mulai diselenggarakan di desa Sekunyit.

Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya meliputi aspek ekonomi (pendapatan) tetapi juga meliputi aspek sosial (pendidikan, kesehatan dan agama), lingkungan dan infrastruktur. Pengembangan aspek ekonomi penting untuk meningkatkan IPTEK dan IMTAQ serta sikap dan perilaku. Aspek lingkungan penting untuk kelestarian sumber daya pesisir dan laut serta pemukiman. Aspek infrastruktur dibutuhkan untuk memperlancar mobilitas pelaksanaan kegiatan ekonomi dan sosial. Keempat aspek ini harus ditunjang oleh kelembagaan ekonomi yang kuat dan dikembangkan secara seimbang agar kesejahteraan dapat ditingkatkan secara optimal.

Keberhasilan dalam peningkatan pendapatan (ekonomi) akan mempengaruhi oleh kegiatan usaha yang dikembangkan dan permodalan yang dapat disediakan serta kondisi pasar yang mendukungnya. Kegiatan usaha itu sendiri keberhasilannya akan dipengaruhi oleh kondisi sumber daya laut dan pesisir yang ada., teknologi yang tersedia serta SDM yang akan mengelola kualitas sumber daya yang dicirikan oleh perilaku IMTAQ serta wawasan IPTEK, kondisi sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tingkat pendidikan, kesehatan dan agama. Hal tersebut penting untuk diperhatikan dan dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi yang meliputi manajemen usaha, kemitraan dan kelembagaan yang dikelolanya. Untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi peran pemerintah masih sangat dibutuhkan terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk di dalamnya kebijakan pemerintah dan, akses modal dan pasar dan tata ruang kawasan pesisir.

Keberhasilan program PEMP harus didukung oleh kegiatan ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi sumber daya lokal dengan memprioritaskan partisipasi masyarakat setempat dan memperhatikan skala dan tingkat kelayakan ekonomi. Pengembangan organisasi dan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat yang berbasis pada budaya lokal perlu dilakukan untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi yang dikembangkan. Hal ini penting terutama untuk membantu mengantisipasi dan menyelesaikan konflik sosial yang terjadi dalam pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir.

Hasil penelitian mengenai Evaluasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir atau sering disingkat dengan PEMP merupakan suatu program dari kementerian kelautan dan perikanan melalui PUPI (Direktorat Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap). Program PEMP ini dibentuk pada tahun 2018 di desa sekunyit, menjadi dasar dari pembentukan program PEMP ini adalah karena melihat kondisi masyarakat nelayan tradisional di desa sekunyit yang sulit berkembang karena adanya keterbatasan akses di dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari di dalam melaut. Program PEMP ini berupa bantuan berupa alat tangkap berupa jaring, perbaikan alat tangkap, pembelian mesin atau perbaikan mesin.

Adapun menurut bapak Dary selaku ketua koperasi Mina Maritim Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dalam proses pelaksanaan

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir perdesaan ini ditemui beberapa hambatan-hambatan dalam upaya pencapaian tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan, yaitu :

1. Dana yang di terima oleh masyarakat nelayan kurang banyak.
2. Beberapa masyarakat nelayan kurang tersentuh dan tidak tepat sasaran.
3. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat.

Dengan adanya ketiga hambatan ini membuat program PEMP yang dilaksanakan di desa sekunyit ini tidak berhasil dalam memberantas kemiskinan yang ada di desa sekunyit. Maka dari itu pemerintah hendaknya mencari solusi yang tepat agar program ini dapat tersalurkan dan berhasil dalam menyejahterakan masyarakat pesisir terutama nelayan.

Ketercapaian Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) di Desa Sekunyit

Tujuan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) terbentuk sebagai langkah untuk mengatasi kemiskinan karena keterbatasan masyarakat nelayan kecil di dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari sehingga dibuatlah keputusan kementerian kelautan KEP.15/DJ-PT/2011 tentang pedoman teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha mina perdesaan untuk bidang perikanan tangkap. Tetapi setelah pelaksanaan yang telah dijalankan di Desa Sekunyit, tujuan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) dapat dikatakan kurang tercapai di Desa Sekunyit, hal ini terbukti bahwa program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir masih belum mampu untuk menciptakan kesejahteraan, karena penghasilan mereka masih relatif minim. Selain itu masih ada beberapa masyarakat penerima PEMP yang belum mengerti betul apa tujuan program PEMP mereka tahunya adalah mereka mendapatkan bantuan jaring atau kapal dan mesin.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) dapat diterapkan karena adanya sumberdaya yang cukup memadai, karena mereka sebelumnya sudah mengetahui tentang kelautan dan perikanan, serta mempunyai pengalaman tentang pemberdayaan masyarakat. Pada tahun awal pelaksanaan program PEMP ini masyarakat nelayan tradisional merasa sangat terbantu dengan adanya program PEMP ini, alat mereka untuk menangkap ikan bertambah karena dulunya sangat susah untuk membeli alat tangkap ikan berupa jaring, dapat membeli atau memperbaiki mesin. Tetapi prosesnya berjalan kurang efektif karena setelah tahun kedua, ketiga dan tahun keempat program PEMP ini dilaksanakan, kondisi masyarakat nelayan yang menerima bantuan PEMP ini kembali ke kondisi semula sebelum menerima bantuan program PEMP, dimana mereka sangat kesulitan di dalam memperbaiki jaring ataupun perbaikan kapal, dan pendapatan mereka relatif menurun karena alat jaring mereka pada rusak, hal ini disebabkan karena iuran anggota macet, jika alat mereka rusak menyebabkan mereka kesulitan di dalam memperbaikinya. Masih ada beberapa warga yang mengeluh mereka kurang sejahtera karena hasil mereka menangkap hanya untuk makan sehari-hari dan habis untuk membeli solar.

Proses pencapaian tujuan program PEMP kurang efektif karena para nelayan kurang memahami akan program PEMP sehingga kesadaran para nelayan untuk memajukan Koperasinya kurang. Pada sisi ketercapaian dan ketepatan program ada hal yang perlu diperhatikan yaitu kurang sistematisnya program, kurang maksimalnya peran pemerintah dalam membina warga untuk mengembangkan usahanya karena beberapa warga mengeluhkan jarang ada sosialisasi dari Dinas kelautan dan perikanan dan juga dalam hal permodalan usaha masyarakat nelayan dirasa kurang cukup.

Ketepatan Pencapaian Tujuan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) di Desa Sekunyit

Prioritas dalam pencapaian tujuan program PEMP adalah pengentasan kemiskinan bagi masyarakat nelayan yang anggarannya berasal dari pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan di dalam mencapai tujuan prioritas itu tergantung dengan kedisiplinan, kejujuran dalam mengelola keuangan jika mereka dapat mengelola dengan baik otomatis ada peningkatan kalau tidak dikelola dengan baik tidak akan memberi peningkatan bagi dirinya ataupun Koperasinya. Yang terjadi di Desa Seunyit para anggota Koperasi kurang mampu di dalam mengembangkan Koperasinya, hal itu terlihat dari iuran anggotanya macet sehingga disaat anggota lain alatnya rusak tidak bisa meminjam dari uang kas Koperasinya, yang terjadi mereka akan kembali kepada jerat kemiskinan.

Pencapaian tujuan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dapat dikatakan sudah tepat, tetapi hasil dan pelaksanaannya yang sudah di capai di Desa Sekunyit ini kurang begitu efektif. Hal ini terlihat dari beberapa masyarakat nelayan mengaku senang karena melalui bantuan PEMP ini mereka yang dulunya susah di dalam membeli jaring, melalui bantuan PEMP ini dapat jaring yang baru atau memperbaiki jaring yang sudah rusak, atau bahkan dari mereka mendapat mesin yang baru. Tetapi jika hasil yang dicapai diukur dengan peningkatan pendapatan mereka hal terlihat tidak begitu efektif. Karena masyarakat nelayan tradisional mengeluhkan pendapatan yang sedikit karena mengingat ikan di laut juga musiman ditambah lagi kondisi laut yang sudah overfishing, jaring yang sudah di dapat saat awal



program PEMP bergulir sampai saat ini jaring yang di dapat sudah pada rusak, banyak masyarakat mengeluhkan dana yang diterima sedikit, jadi habis untuk membeli peralatan membuat jaring yang baru.

Faktor penghambat dalam Pencapaian Tujuan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) di Desa Sekunyit

Hambatan dalam pencapaian tujuan program hambatan seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat nelayan, menyebabkan para masyarakat kurang berpartisipasi di dalam kemajuan Koperasinya, sehingga kesadaran para nelayan yang tergabung ke dalam anggota Koperasi tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk memajukan Koperasinya menjadi lebih berkembang dan maju, hal ini terlihat iuran anggota bagi setiap Koperasi yang sudah dirancang sebelumnya tidak bisa berjalan atau dapat dikatakan iurannya berhenti. Kondisi yang demikian tidak dicoba untuk diminimalisasi dengan mengupayakan mencari solusi yang terbaik di dalam mengatasi masalah program PEMP ini, sehingga hasil yang dirasakan oleh masyarakat nelayan terutama yang menerima bantuan PEMP masih belum maksimal, kecuali alat tangkap mereka ada yang baru.

Dalam isi ketepatan pencapaian program hanya perlu memaksimalkan sasaran program yaitu masyarakat nelayan Desa Sekunyit, kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur karena masih ditemukan beberapa orang dari masyarakat nelayan yang belum tersentuh program dan kurangnya partisipasi anggota Koperasi untuk memajukan Koperasinya menjadi lebih berkembang, sehingga akibatnya banyak masyarakat yang belum dapat dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Perdesaan (PEMP) ini. Pada sisi ketercapaian dan ketepatan programnya ada hal yang perlu diperhatikan yaitu kurang maksimalnya peran pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan perikanan di dalam membina masyarakat nelayan kecil, hal ini terlihat dari kurangnya sosialisasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat nelayan untuk bagaimana memotivasi mereka untuk mengembangkan Koperasinya sehingga dapat menciptakan semangat berwirausaha, sehingga akan membawa kesejahteraan nelayan meningkat dengan hasil tangkapan yang sangat mengingkat pula. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan masyarakat nelayan di Desa Sekunyit, kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur pada tahun pertama mendapatkan respon positif dari masyarakat nelayan karena dengan adanya bantuan PEMP ini mereka bisa melakukan perbaikan jaring, melakukan perbaikan perahu ataupun mesin, serta melalui bantuan ini mereka mendapatkan alat jaring baru. Lebih lanjut pihak Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur sangat Berharap untuk kedepannya program-program pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga semua pihak.

Tabel 5. Nama-Nama Anggota Koperasi Mina Maritim

No	Nama
1	Dahri
2	Abdul Musa
3	Yudi Kurniawan
4	Suhirno
5	Sukardi
6	Sigit Yulian
7	Mursalin.A
8	Alamsyah
9	Nofi Asnawi
10	Busri
11	Ujang Tamrin
12	Basri.Z
13	Aprizal
14	Yudi Arsan
15	Zahiri
16	Tabri
17	Zairin
18	Arpandi
19	Syafri

PEMBAHASAN

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan keputusan Dirjen PT Nomor KEP.15/DJ-PT/2011. Tujuan PEMP Perikanan Tangkap, yaitu mendorong peningkatan produksi, menumbuhkan semangat kewirausahaan, meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi masyarakat nelayan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan di perdesaan. PEMP Perikanan Tangkap dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan KKP maupun Kementerian/Lembaga lain. Disamping itu, program PEMP Perikanan Tangkap diupayakan juga dapat mendukung kegiatan pembangunan kawasan minapolitan khususnya minapolitan perikanan tangkap.

Program PEMP ini diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan yang kurang mampu atau miskin. Karena diharapkan dengan adanya program PUMP ini dapat memberikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan desa sekunyit pada tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya.

Proses Terbentuknya Tujuan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Proses terbentuknya program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) adalah kesadaran pengentasan kemiskinan merupakan hak bagi setiap negara sebagaimana diamanahkan dalam kontitusi, karena jika dibiarkan terus menerus yang terjadi adalah masyarakat kecil akan semakin terpinggirkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama PUPI (Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan) mencoba untuk mengatasi kemiskinan masyarakat nelayan terutama bagi mereka nelayan harian atau one day fishing karena mereka diibaratkan sebagai nelayan kecil. Atas dasar itulah maksud dan tujuan dari adanya program PEMP adalah :

- a. Mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM),
- b. Untuk meningkatkan kemampuan, pendapatan dan kesejahteraan nelayan kecil desa sekunyit secara berkelanjutan melalui pemberian bantuan.
- c. penguatan kelembagaan sosial, ekonomi, dengan mendayagunakan sumber daya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan.

Keterlibatan para nelayan dalam program PEMP

Keberhasilan maupun kegagalan suatu program tergantung dari keterlibatan para nelayan di dalam pelaksanaan program PEMP. Dikatakan sebuah kebijakan itu berhasil jika ada keikut sertaan mereka di dalam pelaksanaan, sebaliknya jika tidak ada keterlibatan mereka dalam pelaksanaan maka program PEMP ini tidak berhasil. Jadi bentuk keterlibatan para nelayan di dalam pelaksanaan program PEMP adalah setiap nelayan tradisional tergabung ke dalam Koperasi biasanya jumlah anggota di dalam setiap Koperasi sekitar 20 orang, sehingga jika mereka mendapatkan bantuan sebesar 100 juta masing-masing anggota mendapatkan uang 5 juta. Ketua Koperasi bersama tenaga pendamping membelanjakan uang 100 juta tersebut sesuai dengan RUB yang telah disusun sebelumnya untuk keperluan sarana dan prasarana di dalam menangkap ikan seperti perbaikan jaring atau pembelian jaring, perbaikan mesin, serta perbaikan perahu.

Bapak Abdul Musa selaku sekretaris koperasi Mina Maritim dalam program PEMP berpendapat bahwa bentuk keterlibatan mereka dalam program PEMP adalah

“Program PEMP ini pemberian bantuan berupa buttom up seperti pemberian bantuan kapal, mesin dan alat tangkap ika, akan tetapi bantuan tersebut harus melalui koperasi. Seperti koperasi mina maritim dijalankan oleh kami ini. Dimana diketuahi oleh bapak Dary dan memiliki anggota 20 orang.”

Lembaga yang harus dibentuk dalam pelaksanaan program PEMP

Lembaga yang harus dibentuk dalam pelaksanaan program PEMP adalah Koperasi yang sebelumnya sudah masuk ke dalam database Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur selanjutnya diverifikasi dengan melihat pendirian yang sudah di sahkan oleh badan hukum, ada ADRTnya, ada modal awal, ada kantor sekretariatnya, dan aktivitasnya yang betul-betul di laut. Kemudian koperasi-koperasi tersebut dibina oleh tim teknis dalam hal ini . Hasil wawancara dengan bapak Abdul Musa selaku sekretaris koperasi Mina Maritim dalam program PEMP desa sekunyit pada tanggal 26 juli 2022 pukul 09.00 adalah Dinas Kelautan dan Perikanan agar dapat mengelola dana bantuan PEMP. Peran Koperasi sangat penting di dalam pelaksanaan program PEMP karena KUB ini berfungsi sebagai penyalur modal usaha kepada anggotanya.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Abdul Musa selaku sekretaris koperasi Mina Maritim dalam program PEMP:

“Koperasi harus sudah masuk database kelautan. Selama dia bentuk-bentuk sendiri tanpa adanya database di perikanan tangkap maka dia tidak bisa. Jika sudah masuk ke dalam database maka



kelompok sudah sah pendiriannya, ADRTnya sudah ada modal awal, kantor sekretariatnya ada anggotanya, ada aktivitasnya. Itulah koperasi- koperasi yang di validasi artinya yang berhak nanti ranging memperoleh PEMP.”

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu atau miskin untuk mendapatkan bantuan modal berupa jaring atau perbaikan mesin sehingga diharapkan dapat membawa perubahan masyarakat nelayan menjadi lebih sejahtera dengan hasil ikan yang ditangkapnya hal ini disebabkan karena adanya perbaikan atau penambahan jaring. Bantuan ini disalurkan melalui Koperasi dengan tahap awalnya setiap Koperasi menyusun RUB yang nanti akan diverifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. setiap bulannya ada laporan yang harus disusun oleh ketua Koperasi bersama tenaga Pendamping, laporan yang disusun dapat berupa laporan bulanan, laporan semesteran, maupun laporan akhir tahun.

Hal ini juga disampaikan oleh Pak dary selaku ketua koperasi Mina Maritim menyampaikan, bahwa: “Efektif, setiap bulannya ada laporan produktifitas kelompok kami”.

Hasil yang di dapat oleh warga masih dapat dikatakan minim, setelah kegiatan ini berjalan beberapa kali, karena pendapatan yang di dapat warga di dalam mencari ikan hanya mampu untuk membeli solar dan perbekalan, mengingat kondisi musim di laut yang tidak stabil.

Perkembangan Program Kearah Tujuan Program PEMP

Perkembangan program PEMP selama 4 tahun berjalman sudah mengupayakan peningkatan akses dan mutu masyarakat nelayan melalui bantuan mesin, kapal ataupun alat tangkap ikan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Tetapi semua itu tergantung dari sikap anggotanya, jika anggota ingin Koperasinya nya maju maka setiap bulan mereka rajin membayar iuran anggota, tetapi jika para anggota tidak ingin Koperasinya berkembang maka iuran bulannya macet.

Menurut Pak yudi selaku bendahara koperasi Mina Maritim dalam program PEMP mengatakan bahwa :

“Mestinya PEMP berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi semua itu tergantung dengan kedisiplinan, kejujuran dalam mengelola keuangan jika mereka dapat mengelola dengan baik otomatis ada peningkatan kalau tidak ya cukup ya tergantung dengan penerima jika penerima mau mengembangkan pasti sangat-sangat membantu”.

Penerapan Tujuan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) cukup dapat diterapkan dengan baik di Desa Sekunyit. Masyarakat mengaku dengan adanya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir atau sering disingkat dengan PEMP pada awalnya mendapatkan kemudahan sehingga program tersebut cukup dapat diaplikasikan. Meskipun ada beberapa masyarakat menyatakan bahwa tujuan program PEMP ini kurang dapat diaplikasikan dengan baik. Karena ada beberapa masalah diantaranya penerima program bantuan PEMP tidak tepat sasaran dimana mereka bekerja sebagai tukang dok kapal tidak nelayan murni nyatanya mereka mendapatkan bantuan dari program PEMP meskipun ktpnya sebagai seorang nelayan tetapi mereka tidak bekerja sebagai seorang nelayan tetapi hanya sebagai tukang dok kapal.

Pak Dary selaku ketua Koperasi Mina Maritim juga mengatakan bahwa: “Dapat dilakukan secara baik, bagus justru dengan adanya PEMP dapat meningkatkan kinerja dari para anggota yang dulunya malas mungkin alatnya kurang bagus pendapatan yang kurang sehingga dengan modal bantuan dari pemerintah itu bisa lebih semangat kerjanya”.

Sebaliknya Pak Abdul Musa selaku sekretaris Koperasi Mina Maritim menyampaikan hal yang berbeda tentang pelaksanaan program PEMP:

“Setiap bulannya ada laporan produktifitas kelompok kami. Memang kadang PEMP ini salah sasaran memang manusiawi yang dapat belum tentu nelayan meskipun KTPnya nelayan contohnya banyak tukang dok kapal itu memang disitu ada indikasinya kurang bagus menurut saya”.

Prioritas dalam Mencapai Tujuan Program PEMP

Banyak hal yang harus diperhatikan dalam implementasi sebuah program, namun ada hal-hal penting yang harus menjadi prioritas agar tujuan dari program dapat tercapai. Prioritas dalam pencapaian tujuan program PEMP.

Menurut bapak dary selaku ketua dari koperasi Mina Maritim dalam program PEMP desa sekunyit adalah :

“ Tujuan utama dari program PEMP yaitu meningkatkan pendapatan para nelayan sehingga dengan meningkatnya pendapatan itu akan mengakibatkan dia jadi sejahtera”.

Jadi kita bisa mengetahui bahwa prioritas yang diambil dalam pelaksanaan program PEMP adalah meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan yang sehingga dia mendapatkan pendapatan yang meningkat hal ini akan membawa mereka pada peningkatan pendapatan mereka sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi mereka dan memandirikan mereka secara ekonomi, serta meningkatkan fungsi kelembagaan nelayan.

Evaluasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan Desa Sekunyit

Dalam pelaksanaannya (sosialisasi, pelatihan, pencarian dana bantuan, penanggulangan), telah berjalan seoptimal mungkin oleh pihak-pihak yang berkewenangan untuk menjalankan program ini. Namun bagi masyarakat nelayan, program PEMP belum terlaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan rendahnya pemahaman partisipasi, pemahaman akan teknologi perikanan (tangkap dan budidaya) dan manajemen yang mengakibatkan pengolahan dan keberlangsungan kelompok nelayan khususnya budidaya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Penyaluran Bantuan Pelaksanaan program PEMP merupakan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan pesisir umumnya dan khususnya masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Kaur (Desa Sekunyit) yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas nelayan secara mandiri guna peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Perhatian Pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan di desa Sekunyit sangat besar karena potensi dan sumberdaya kelautan yang sangat melimpah, namun belum dikelola secara maksimal melalui pola dan teknik penangkapan yang tepat guna. Pemberdayaan masyarakat nelayan dilakukan dengan prosedur atau mekanisme penyaluran bantuan PEMP ini berjalan sesuai dengan pedoman umum program tersebut. Pada tahapan ini, penyaluran bantuan yang diberikan berupa alat penangkapan motor tempel dan jaring atau alat pancing kepada sasaran group (kelompok) yang telah dibentuk.

Efektifitas penyaluran bantuan berjalan sesuai perencanaan, dimana setiap kelompok yang menerima diawali dengan tahap identifikasi, seleksi, verifikasi. Penyaluran bantuan diberikan kepada kelompok sasaran yaitu masyarakat desa Sekunyit yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Pelaksanaan penyaluran bantuan kepada masyarakat menurut hasil wawancara penulis dengan ketua koperasi Mina Maritim Kabupaten Kaur, diperoleh penjelasan bahwa praktek penyaluran bantuan sering terlambat dan ada paket yang kurang lengkap. Hal ini disebabkan karena semua bahan bantuan dipesan melalui Jasa Pihak Ketiga yang ada di Kabupaten Kaur. Proses semacam ini sering menimbulkan rasa ketidakpuasan dari kelompok masyarakat terhadap kebijakan dan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur. Prosedur dan mekanisme penyaluran bantuan diberikan pada saat alat penangkapan ikan yang akan diberikan sudah ada, dan masyarakat dapat mengambil sendiri atau disampaikan langsung oleh konsultan sehingga tidak tepat waktu sesuai petunjuk dari pemerintah. Namun demikian dari segi manfaat dapat dinilai bantuan tersebut cukup bermanfaat bagi masyarakat nelayan.

Menurut William N. Dunn (1999: 608-610) Ketepatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dapat dilihat dari aspek-aspek berikut :

a. Kesesuaian dengan metode implementasi

Efektif atau tidak Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini adalah pelaksanaan yang dilakukan oleh instansi ± instansi atau aktor yang tepat dalam menanganinya. Pada implementasinya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini sudah baik, dimana ini dapat dilihat dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur sudah melaksanakan kegiatan tersebut secara terprogram setiap tahunnya.

Terdapat kekurangan dimana dalam hal pengimplementasian Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini pihak desa Sekunyit kurang ikut berperan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini. Pihak desa sekunyit dalam program ini hanya sebatas memfasilitasi saja tanpa ikut terlibat langsung dalam melaksanakan program tersebut. Faktor lain yang ikut mempengaruhinya yaitu apabila dilihat dari sumber daya, dimana tidak adanya informasi mengenai tata cara pelaksanaan. Tidak adanya informasi mengenai tata cara pelaksanaan ini juga mempengaruhi pihak desa Sekunyit hanya menjadi fasilitator dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ini. Dimana dengan tidak adanya tata cara pelaksanaan ini membuat pihak desa Sekunyit hanya mengikuti perintah atau himbuan dari dinas tanpa tahu harus melakukan apa pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini.

b. Kesesuaian dengan tujuan

Salah satu indikator efektif dari implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yaitu dengan melihat dari ketepatan tujuan, dimana dalam hal ini mampu menangani laju tingkat kemiskinan yang terdapat di wilayah pesisir desa Sekunyit yang semakin lama meningkat.



Dilihat dari hasil penelitian dilapangan dimana kegiatan dalam program ini harus dilakukan untuk demi meningkatkan kemampuan perekonomian masyarakat pesisir terutama nelayan.

Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini sudah sesuai dengan tujuan. Ini dapat dilihat dari kegiatan ± kegiatan yang berbasis pada masyarakat, seperti pemberian bantuan berupa kapal dan alat tangkap ikan kepada kelompok masyarakat di desa Sekunyit. Sudah sesuai dengan tujuan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini tentu saja dipengaruhi beberapa faktor ± faktor yang mendukung.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini dirasakan oleh masyarakat pesisir Kabupaten Kaur sudah tepat dengan tujuan dari program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, karena dengan adanya program ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama nelayan. kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur yaitu dengan memberikan bantuan berupa kapal dan alat tangkap ikan kepada kelompok masyarakat pesisir sehingga dengan pemberian bantuan ini kelompok masyarakat dapat mengembangkan produksinya sehingga dapat memberikan keuntungan yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi nelayan.

c. Kesesuaian dengan kompetensi

Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini sudah sesuai dengan kemampuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur yang ditentukan seperti pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat. Namun, kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan desa sekunyit dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini yaitu dengan tingginya permintaan masyarakat membuat bantuan tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur.

Kendala ini tentu saja tidak lepas dari beberapa faktor ± faktor yang mempengaruhinya. berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhinya yaitu dari faktor sumber daya. Dimana sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini dana yang dianggarkan dirasa kurang, hal ini disebabkan karena dana yang dianggarkan tidak sesuai dengan banyaknya masyarakat yang harus diberdayakan sehingga tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan. Oleh karena itu untuk mengatasi hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur tentu akan secara bertahap memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat. Hal ini dilakukan agar kualitas dan kuantitas bantuan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur.

d. Kesesuaian dengan sumber daya

Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini sudah sesuai dengan sumber daya yang ada di desa sekunyit. Namun, kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini yaitu dimana masyarakat desa sekunyit kurang menguasai dalam mengelola sumber daya yang ada.

Kendala ini tentu saja tidak lepas dari beberapa faktor ± faktor yang mempengaruhinya. Dimana sumber daya alam yang tersedia begitu banyak dilaut sekunyit akan tetapi karena kurangnya pengetahuan masyarakat desa sekunyit dalam pengelolaan sumber daya yang ada sehingga sumber daya yang tersedia banyak yang tidak digunakan atau dikelola dengan baik.

e. Kesesuaian dengan lingkungan

Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini sudah tepat bagi masyarakat, karena kegiatan - kegiatan yang terdapat di dalam program ini sudah mampu meningkatkan kemampuan perekonomian masyarakat terutama para nelayan yang sangat membutuhkan program ini. Seperti pemberian bantuan kapal serta alat tangkap ikan kepada kelompok masyarakat melalui koperasi untuk dikembangkan sehingga dengan bantuan tersebut nelayan mampu meningkatkan kemampuan ekonominya. Namun, terlepas dari itu terdapat suatu kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini, dimana menurut hasil wawancara informan didapatkan bahwa ada beberapa kelompok masyarakat yang menyimpang dimana bantuan yang diberikan dijual oleh kelompok tersebut.

Kendala yang terjadi ini tentu tidak lepas dari faktor - faktor yang mempengaruhinya. Dimana dilihat dari struktur birokrasinya, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur terhadap program ini dirasakan kurang. Untuk pengawasan pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur hanya 4 sampai 5 kali dalam 1 tahun melakukan pengawasan ini. Tentu saja ini sangat kurang sehingga timbul kendala seperti ini. Seharusnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur terhadap Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini

dilakukan setiap bulan sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur dapat mengetahui perkembangan dari bantuan yang mereka berikan dalam rangka melaksanakan program pemberdayaan ini.

Faktor penghambat program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di desa sekunyit kecamatan kaur selatan kabupaten kaur

Menurut Bapak Dary selaku ketua koperasi Mina Maritim, program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dalam menjalankan programnya terdapat 3 faktor penghambat yaitu :

a. Keterbatasan Anggaran

Anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat pesisir, hal ini dikarenakan anggaran merupakan faktor penggerak seluruh elemen–elemen dari sebuah lembaga pemerintahan. Seperti hasil wawancara peneliti dengan ketua koperasi mina maritim sebagai berikut:

“Anggaran pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat pada khususnya masyarakat pesisir atau nelayan ini memang terbatas, oleh karena itu pemberdayaan bantuan kapal dan alat tangkap ikan ini benar-benar dilaksanakan dan didata sesuai kebutuhan nelayan yang tepat sasaran, apalagi masih banyak nelayan yang belum mendapatkan bantuan dan masih sangat perlu untuk mendapatkan bantuan.”

Pelaksanaan program bantuan kapal dan alat tangkap ikan merupakan salah satu bentuk pemberian modal dan usaha kelompok masyarakat seperti kelompok masyarakat nelayan dan kelompok masyarakat lainnya ini sangat diperlukan anggaran yang tidak sedikit, agar semua masyarakat yang memang wajib dan berhak mendapatkan itu semuanya bisa menerima bantuan. Adanya bantuan kapal dan alat tangkap ikan sebagai salah satu modal para nelayan tentu dapat menimbulkan kepuasan masyarakat nelayan terhadap program yang dijalankan.

Program ini sudah berjalan dalam waktu yang tidak sebentar. Tentu saja diharapkan membawa banyak perubahan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat nelayan yang miskin, meskipun anggaran yang di sediakan memang tidak banyak dan terbatas. Pemberdayaan masyarakat pesisir memang perlu anggaran yang tidak sedikit mengingat jumlah anggota keluarga yang berada dalam kategori miskin cukup banyak. Dengan demikian seperti yang terjadi di masyarakat, ada yang kontra dengan program bantuan kapal dan alat tangkap ikan karena merasa pemberian bantuan ini tidak secara merata maka tidak akan terjadi. Karena sejatinya pemberdayaan masyarakat sendiri itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Namun hal tersebut bukanlah faktor kesengajaan melainkan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah tetapi pemerintah tetap berusaha agar pemberian bantuan itu dapat secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan.

b. Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu faktor atau kendala yang bisa menghambat keberlangsungan program pemberdayaan masyarakat pesisir ini yaitu kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki dalam hal ini yang dimaksud adalah para pelaku yang melaksanakan program pemberdayaan dalam hal ini yang melaksanakan program pemberdayaan dalam hal ini dimaksud adalah para masyarakat dalam penerapan metode dan teknologi budidaya maupun penangkapan.

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia terutama masyarakat pesisir yaitu nelayan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. Fakta tersebut cukup memperhatikan, mengingat masyarakat nelayan dikenal dengan sangat dekat dengan sumberdaya hayati yang ada dilaut. Namun dengan potensi kelautan dan perikanan yang selama ini yang ada, ternyata masi belum bisa mensejahterakan masyarakat dikawasan pesisir.

Maka dari itu diperlukan pembinaan kelompok nelayan maupun kelompok lainnya sehingga terwujudnya sumberdaya yang berkualitas melalui peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, peningkatan sosial, dan budaya agar dapat dan mampu menjangkau sumberdaya alam, permodalan, teknologi, dan mampu memenuhi kebutuhan dasar.

c. Kurang pengawasan dari pihak Dinas Kelautan Dan Perikanan dalam melaksanakan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir desa Sekunyit dalam pelaksanaannya kurang pengawasan dari Dinas Kelautan Dan Perikanan yang mengakibatkan kurang efektifnya dalam menjalankan programnya. Seharusnya Dinas Kelautan Dan Perikanan melakukan pengawasan satu bulan sekali agar efektif berjalannya program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

Adapun faktor lain yang dapat menghambat berjalannya program pemp adalah:



- a. Bantuan tidak merata atau terkesan tebang pilih.
- b. Kelompok yang lolos verifikasi beranggapan bahwa bantuan yang di berikan adalah hasil usaha mereka sendiri sehingga tidak ada upaya yang luar biasa dari mereka dalam memanfaatkan bantuan yang telah di terima.
- c. Pola gaya hidup kelompok masih sangat konsumtif atau terkesan boros yang menyebabkan terjadinya kemiskinan kultural
- d. Managemant keuangan yang buruk.
- e. Tidak dilakukan pendampingan dari pemerintah yang harusnya rutin dilakukan sehingga terjadi kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat yang mengakibatkan manajemen yang dilakukan oleh para KUB menjadi kurang baik atau bisa dikatakan buruk yang menjadi akar terjadinya kemiskinan secara structural.

Dalam sebuah pelaksanaan program tentunya adah factor pendukung maupun factor penghambat yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan suatu program begitu juga pada program PEMP Desa Sekunyit. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor utama yang dapat mempengaruhi keberhasilan program PEMP adalah factor penghambat, bisa juga disebut masalah atau problem. Masalah sendiri menurut Prajudi Atmosudirjo, masalah merupakan sesuatu yang menyimpang dari apa yang di harapkan, direncanakan dan ditentukan untuk dicapai sehingga masalah merupakan rintangan atau tantangan menuju tercapainya sebuah tujuan.

Apa yang dikemukakan Prajudi Atmosudirjo di atas sangat sesuai dengan hasil temuan peneliti bahwa terjadi penyimpangan antara apa yang di harapkan dan direncanakan dari diadakanya PEMP. Sehingga menjadi sebuah rintangan atau tantangan untuk tercapainya tujuan dari diadakanya PEMP.

Hasil temuan penelitian juga sesuai dengan yang dikemukakan Notoadmojo, bahwa masalah merupakan suatu kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sudah terjadi tentang suatu perihal, atau kesenjangan antarakenyataan yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi serta harapan dan kenyataannya.

Temuan penelitian sangat jelas menyatakan bahwa terjadi kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi untuk bersungguh-sungguh melaksanakan program PEMP karena saat mereka bersungguh-sungguh terkadang bantuan yang diharapkan tidak kunjung tersalurkan, justru masyarakat yang tidak bersungguh- sungguh bahkan KUB nya sudah tidak berjalan lagi kepengurusanya bisa mendapatkan bantuan dari program PEMP tersebut, yang ujung- ujungnya akan digunakan untuk keperluan pribadi buakan kelompok. Beberapa anggota KUB banyak yang mengeluhkan mengenai hal tersebut mereka beranggapan bahwa pemerintah atau dinas terkait tebang pilih dalam penyaluran bantuan program PEMP tersebut, di mana yang merasa dekat denggan petugas maka akan mendapatkan bantuan tersebut.

Diketahui bahwa menurut Arif Rohman ada tiga faktor yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu, Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak. Selanjutnya faktor yang terletak pada personil pelaksana, yakni yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan. Termasuk dalam personil pelaksana adalah latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian masingmasing. Semua itu akan sangat mempengaruhi cara kerja mereka secara kolektif dalam menjalankan misi implementasi kebijakan. Sedangkan yang terakhir yaitu faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Ketepatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di desa Sekunyit kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dilihat dari aspek kesesuaian dengan metode implementasi, Kesesuaian dengan tujuan, Kesesuaian dengan kompetensi, Kesesuaian dengan sumber daya, dan Kesesuaian dengan lingkungan belum sesuai dengan tujuan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir terutama desa sekunyit.

Faktor penghambat program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir adalah keterbatasan anggaran (modal) dimana anggaran dari pemerintah terbatas sehingga tidak semua masyarakat dapat mencukupi kapal yang diberikan dan kualitas SDM yang masih rendah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis menyadari masih terdapat banyak keterbatasan dan kekeliruan yang ada dalam penelitian ini. Namun dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, Riant. Public Policy. Jakarta Pusat: Kompas Gramedia Penerbitan, 2003.
- Dunn, Willian N, 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Haldun, M, 2008. "Implikasi Normalisasi Sei Badera Terhadap Pemukiman Masyarakat di Kecamatan Medan Marelan". Tesis, Program Pasca Sarja Universitas Sumatera Utara – Medan.
- Nugroho, Riant, 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sinambela, L.P., dkk, 2006. Reformasi Pelayanan Publik. Bumi Aksara, Jakarta.
- Suharto, E, 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Refika Aditama, Bandung.
- Abdul Wahab, Solichin, 2001. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta : Bumi Aksara,
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Alkin, Marvin. 1972. Accountability defined : Evaluation Comment. The Journal of Educational Evaluation 3 : 1-5
- Alkin, Marvin C. & Christie, Christina A. 2004. Evaluation Theory Tree. In Evaluation Roots. Thousand Oax, CA : Sage Publication
- Anderson, J. E. 1978. Public Policy Making. New York: Holt Rinehart and Winston.
- Anderson, J. E. 1984. Public policy and politics in America. Harcourt Brace.
- Anggara, Sahya 2014. Kebijakan Publik. Bandung : Pustaka Setia
- Eko, Sutoro (2004). Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Yogyakarta APMD Press.
- Ife, Jim. (1995). Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice. Australia: Longman
- Friedman, Jhon, (1992). Empowerment, The Politics of Alternative Development, Cambridge Blackwell Publishers.
- Green, John.J (2016). Community Development and Social Development: Informing Concepts of Place and Intentional Social Change in a Globalizing World. Journal Research on Social Work Practice. Sage Publication.
- Arif Rohman, Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: LaksBang Mediatama. 2009, h. 147